

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN  
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**

**(Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



OLEH :

Rizki Hardi Nata  
1101791/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI  
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN  
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**

**(Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



**OLEH :**

**Rizki Hardi Nata  
1101791/2011**

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI  
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi  
(SIM)**

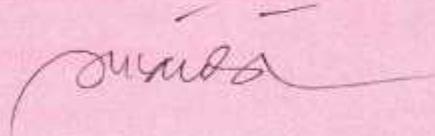
*Studi Kasus pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*

Nama : Rizki Hardi Nata  
BP/NIM : 2011/1101791  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi  
Jurusan : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2016

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Junaidi, S.Pd., M.Si  
NIP. 19680622 199403 1 002

Dosen Pembimbing II



Delmira Syafrini, S.Sos., M.A  
NIP. 19830518 200912 2 004



**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Jum'at, 22 Januari 2016**

**Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi  
(SIM)**

*Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*

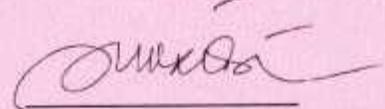
**Nama** : Rizki Hardi Nata  
**BP/NIM** : 2011/1101791  
**Program Studi** : Pendidikan Sosiologi Antropologi  
**Jurusan** : Sosiologi  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, Januari 2016**

**Tim Penguji Nama**

**Tanda Tangan**

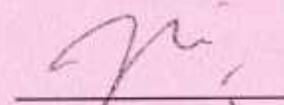
**1. Ketua** : Junaidi, S.Pd., M.Si



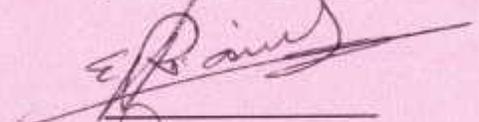
**2. Sekretaris** : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A



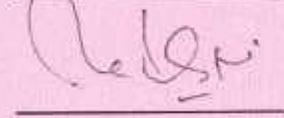
**3. Anggota** : Adri Febrianto, S.Sos., M.Si



**4. Anggota** : Dr. Erianjoni, M.Si



**5. Anggota** : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Hardi Nata  
BP/NIM : 2011/1101791  
Prodi : Pendidikan. Sosiologi-Antropologi  
Jurusan : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

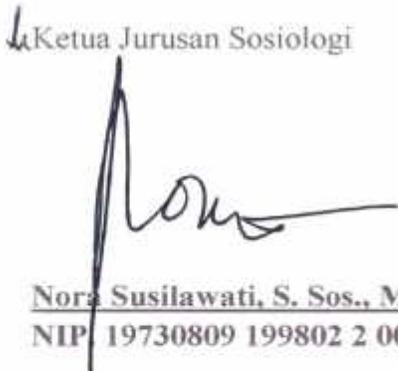
Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul "Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus: Pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang , Januari 2016

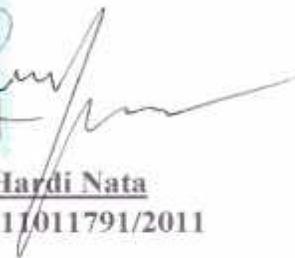
Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

  
Nora Susilawati, S. Sos., M.Si  
NIP. 19730809 199802 2 001

Pembuat Pernyataan,



  
Rizki Hardi Nata  
Nim/ BP. 11011791/2011

## ABSTRAK

**Rizki Hardi Nata. 1101791/2011. Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polres Bukittinggi). Skripsi. Padang. Pendidikan Sosiologi Antropologi. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.**

Pemerintah telah mewajibkan para pengendara bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kebijakan itu tertera pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya kebijakan tersebut diiringi dengan adanya mekanisme pelayanan penerbitan SIM yang diberikan Polri. Mekanisme pelayanan tersebut diawali dengan adanya penetapan persyaratan dan tahapan ujian sebagai tahapan prosedural dalam penerbitan SIM. Namun, kenyataan di lapangan masyarakat tidak selalu mengikuti prosedur yang ada. Sebagian masyarakat menganggap bahwa prosedur tersebut mempersulit mereka karena memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pelayanan yang diberikan terkesan berbelit-belit, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

Penelitian ini dianalisis dengan teori pilihan rasional oleh James.S. Coleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi dengan menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui langkah-langkah yaitu: mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi berbeda-beda. Pertama, perilaku konformitas yang terdiri atas: (1) Perilaku mau mengantri, (2) Perilaku patuh dan taat pada peraturan pembuatan SIM. Kedua, Perilaku non-koformitas yang terdiri atas: (1) Perilaku tidak mau mengantri, (2) Mengikuti jalur pintas, (3) Perilaku yang memanfaatkan pihak ketiga yang terdiri atas: (a) Memanfaatkan jasa calo (b) Memanfaatkan pihak keluarga, kerabat dan teman), (4) Perilaku ikut-ikutan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Bukittinggi) .”**

Terimakasih penulis ucapkan kepada ayah handa Iptu Hardimansri dan Ibunda Yulistri serta saudara-saudaraku Kak Sri Putri Weningsih, A.Md, Yudis, Nadia, Tiara yang telah memberikan dukungan berupa do’a dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjunya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan serta keikhlasan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Erianjoni, M.Si, Bapak Adri Febrianto S.Sos., M.Si dan Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si selaku penguji yang banyak memberikan arahan dan saran demi tercapainya penulisan skripsi ke arah yang baik.

3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
5. Sahabat-sahabatku Dila Akhira Safitri, Fitri Dahlia, Fitria Wulandari, Arfan Ahmad, Andre Wido Wiranata, Mahiska Shara, Gusra Wahyuni, Mega Tri Wahyuni, serta rekan-rekan jurusan Jurusan Sosiologi angkatan 2011.
6. Teman-teman di Kos nenek, Bang Ferdo Badres, Bang Syafrianto, Bang Dede, Bang Adam, Bang Muhelmi, Mas Hasan, Mas Husein.
7. Teman-teman dari FSDI Adi Alviasyah, Yon Virgo, Bambang Kaliwardana, Jefriyanto, Bang Aziz, Bang Hasan Asyari.
8. Informan dan instansi terkait yang telah bersedia memberi data dan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menuliskannya pada skripsi ini.
9. Teristimewa untuk keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, dorongan moril maupun materil kepada penulis.

Pada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan do'a serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan setimpal dari-Nya.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya, dan penulis khususnya.

Padang, Januari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

*Halaman*

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	10
F. Penjelasan Konsep .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	14
1. Lokasi Penelitian .....	14

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
a. Observasi.....	19
b. Wawancara.....	20
c. Angket.....	21
d. Dokumentasi.....	21
5. Triangulasi Data.....	22
6. Analisis Data.....	23
a. Reduksi Data.....	24
b. Penyajian Data.....	24
c. Penarikan Kesimpulan.....	25

## **BAB II Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Bukittinggi**

A. Kota Bukittinggi.....	27
1. Keadaan Geografis.....	27
2. Keadaan Demografis.....	29
a. Pendudukan.....	29
b. Pendidikan.....	30
c. Pekerjaan.....	31
a. Keadaan Masyarakat.....	32
B. Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.....	33
a. Kota Bukittinggi.....	33
b. Kabupaten Agam Timur.....	34

C. Prosedur Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Bukittinggi.....	37
---------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB III Perilaku Masyarakat dalam Mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM)**

A. Perilaku Konformitas.....	44
1. Mau mengantri .....	44
2. Patuh dan taat pada peraturan pembuatan SIM.....	50
B. Perilaku Non-Konformitas.....	61
1. Perilaku tidak mau mengantri.....	62
2. Mengikuti Jalur Pintas penerbitan SIM.....	66
3. Perilaku memanfaatkan pihak ketiga .....	71
a. Memanfaatkan jasa calo .....	72
b. Memanfaatkan keluarga atau kerabat dan teman ....	80
4. Perilaku ikut-ikutan.....	83

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Peningkatan Penerbitan SIM Tahun 2012-2014 di Polres Bukittinggi...	3
2. Keadaan Geografis, Iklim dan Topografi Kota Bukittinggi.....	28
3. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin.....	30

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram</b>	<b>Halaman</b>
1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2013.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model analisis interaktif ( <i>Interactive Model Analisis</i> ) .....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Instrumen Penelitian

Lampiran 2: Daftar Informan Penelitian

Lampiran 3: Foto-Foto Penelitian

Lampiran 4: Surat Tugas Pembimbing

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Lampiran 6: Surat Izin dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan arus globalisasi berdampak logis terhadap kemajuan pengetahuan, teknologi informasi dan transportasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini membuat sektor transportasi semakin memegang peranan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan nasional disegala bidang.<sup>1</sup> Pentingnya sektor transportasi ini langsung ditanggapi oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang mengakibatkan persaingan antar perusahaan otomotif semakin kuat dan ketat. Berbagai perusahaan otomotif juga telah menawarkan *merk, type*, jenis dan model kendaraan dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan serta bonus yang sangat menarik kepada masyarakat yang cenderung bersifat konsumtif.<sup>2</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, menjadikannya sebagai alat utama yang harus dimiliki dan diperlukan sebagai sarana penunjang aktivitas sehari-hari. Kebutuhan dalam budaya konsumen yang tidak terbatas dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal, tetapi juga diperlukan bagi tuntutan dan perkembangan sosial

---

<sup>1</sup> Bahan Ajar Sekolah Alih Golongan (SAG) Pendidikan Pembentukan Perwira Polri. 2011. *Fungsi Teknis dan Manajemen Operasional Lalu Lintas*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 1.

ekonomi.<sup>3</sup> Begitu juga halnya dengan kendaraan bermotor yang diperlukan sebagai tuntutan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Fenomena di atas merupakan awal terbentuknya dinamika kehidupan berlalu lintas. Hal tersebut memicu masalah lalu lintas antara lain kemacetan, pelanggaran hukum, maupun kecelakaan lalu lintas. Terkait permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan guna mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan itu tertera pada UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Adapun tujuan umum dari kebijakan ini yaitu untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009, yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.<sup>4</sup> Adanya kebijakan ini ditanggapi berbagai respons oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi respons tersebut salah satu diantaranya terlihat pada peningkatan jumlah pemohon penerbitan SIM. Peningkatan jumlah pemohon penerbitan SIM di Polres Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 1.

---

<sup>3</sup> Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm 134-138.

<sup>4</sup> Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Tersedia dalam: <http://www.bantuanhukum.or.id>. [diakses 25 Mei 2014].

**Tabel 1: Peningkatan Penerbitan SIM dari Tahun 2012-2014**

Tahun	Jumlah Pemohon	Persentase Peningkatan
2012	20.100	-
2013	21.000	4,48 %
2014	23.000	9,52 %

*Sumber : Satuan lalu-lintas Polres Bukittinggi*

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah pemohon penerbitan SIM setiap tahunnya di Polres Bukittinggi. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan penerbitan SIM sebanyak 4,48% dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebanyak 9,52%. Adanya peningkatan jumlah pemohon penerbitan SIM ini seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas sosial ekonomi ataupun aktivitas lainnya.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>5</sup> SIM diterbitkan sebagai upaya kepolisian untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Kepentingan masyarakat untuk berkendara dan kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban, membuat polisi harus menyediakan sebuah mekanisme pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Katon. 2014. Cara Mengurus SIM (Membuat dan Memperpanjang SIM). Tersedia dalam: <<https://katonsasongko.wordpress.com/>>. [diakses 22 November 2014].

<sup>6</sup> Siahaan, Romeyan Ricardo. 2008. Persepsi Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan SIM C (Studi Pada Kantor Sat Lantas Polresta Tebing Tinggi). *Skripsi*. Departemen Ilmu Administrasi Universitas Sumatera Utara.

Terkait dengan adanya mekanisme pelayanan penerbitan SIM, maka telah ditetapkan persyaratan dan tahapan ujian sebagai tahapan prosedural dalam penerbitan SIM yang diberikan Polri. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut diantaranya: persyaratan usia, persyaratan administrasi, dan persyaratan kesehatan. Setelah memenuhi semua persyaratan, barulah seseorang bisa mengikuti proses ujian yang terdiri dari ujian teori dan ujian praktik. Ujian praktik terbagi lagi menjadi dua yaitu ujian keterampilan mengemudi melalui simulator dan ujian praktik di lapangan.

Pada tahap ujian, maka telah ditentukan syarat-syarat kelulusan yang menentukan apakah pemohon SIM berhak mendapatkan SIM. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu: (a) Peserta uji dinyatakan lulus ujian teori, jika dapat menjawab secara benar paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh soal yang diujikan. (b) Hasil ujian teori diumumkan setelah pelaksanaan ujian dan peserta uji dapat mengetahui hasil kelulusan atau ketidakkelulusan dalam menjawab soal ujian. (c) Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian teori dapat mengikuti ujian praktek keterampilan mengemudi melalui simulator. (d) Peserta ujian praktek keterampilan melalui simulator dinyatakan lulus, jika dapat mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yang diujikan. (e) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator. (f) Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian praktek keterampilan mengemudi melalui simulator dapat mengikuti ujian praktek lapangan. (g) Peserta uji SIM dinyatakan lulus ujian praktek lapangan I, jika peserta uji

tidak melakukan kesalahan pada materi ujian. (h) Dalam hal peserta uji melakukan kesalahan, peserta uji diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktek lapangan I sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal. (i) Ujian ulang tahap pertama atau kedua dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dinyatakan tidak lulus pada ujian praktek lapangan I sebelumnya. (j) Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap pertama dan tahap kedua peserta uji dinyatakan mengundurkan diri, peserta uji yang telah dinyatakan lulus ujian praktek lapangan I diberikan tanda bukti kelulusan, peserta uji harus mengikuti ujian praktek lapangan II.<sup>7</sup>

Penjelasan di atas merupakan tahapan prosedural yang ideal dalam penerbitan SIM. Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan kondisi yang seharusnya. Masyarakat tidak selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa prosedur tersebut mempersulit mereka karena memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pelayanan yang diberikan terkesan berbelit-belit.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara peneliti terhadap (YG), (SY), (WN), (DH ) dan (ZK), mereka menyatakan bahwa proses pengurusan SIM yang mereka tempuh pada saat itu memerlukan waktu yang cukup lama, mereka harus bersabar karena adanya antrian panjang yang harus mereka lalui, ditambah lagi dengan adanya perbedaan perilaku pelayanan yang diberikan.<sup>8</sup> Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang petugas

---

<sup>7</sup> Bahan Ajar Sekolah Alih Golongan (SAG) Pendidikan Pembentukan Perwira Polri, *Op.cit.*, hlm 146-147 .

<sup>8</sup> Wawancara dengan beberapa informan yang pernah membuat SIM di Polres Bukittinggi pada hari Selasa, 25 November 2014.

pengurusan SIM bahwa, terkadang terjadi antrian yang cukup panjang pada saat pengurusan SIM karena banyaknya peminat pemohon SIM dan tahapan prosedural yang harus dilalui calon penerima SIM.<sup>9</sup>

Adanya permasalahan di atas, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sebagian masyarakat dalam mendapatkan SIM, khususnya masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi yang memerlukan sertifikat mengemudi pada saat permohonan penerbitan SIM. Pengaruhnya tersebut terlihat dari cara atau perilaku masyarakat dalam proses mendapatkan SIM, diantaranya perilaku konformitas dan perilaku non-konformitas.

Berdasarkan angket yang telah peneliti sebarakan di wilayah hukum Polres Bukittinggi, sebagian besar masyarakat memilih keluar dari jalur resmi penerbitan SIM. Hal ini terlihat dari angket yang telah peneliti sebarakan ke 150 informan yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi, dimana 96 informan menyatakan memperoleh SIM dengan cara tidak mengikuti jalur resmi penerbitan SIM, sedangkan sisanya 54 informan menyatakan memperoleh SIM dengan cara mengikuti jalur resmi penerbitan SIM.

Penelitian mengenai SIM juga pernah dilakukan oleh Mike Destri Dora (2007) dalam skripsinya “Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi Keliling Pada Polresta Padang”, skripsi program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Mike menggambarkan belum optimalnya pelayanan SIM keliling yang dilakukan pihak Polresta

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Briptu Bastian, Petugas satuan lalu lintas Polres Bukittinggi pada hari Kamis, 25 Juni 2015.

Padang, karena ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan SIM keliling di Polresta Padang. Penyebabnya seperti kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya anggaran.<sup>10</sup>

Penelitian lain yang masih relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Purbadi dalam sebuah artikel jurnalnya “Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian *Resort* Kota Pontianak”, jurnal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Rahmat menggambarkan bagaimana pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, di samping itu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kurang dapat memelihara hubungan kerja serta menciptakan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani, misalnya efisiensi waktu dalam pelayanan, kemudahan pelayanan, dan keadilan pelayanan.

Selanjutnya, Rahmat juga menggambarkan adanya perbedaan pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian, hal ini didasarkan kepada besar kecilnya imbalan yang diberikan oleh masyarakat. Meskipun transparansi biaya pembuatan SIM pada *Resort* Kota Pontianak sudah cukup transparan, namun ada sebagian masyarakat yang harus membayar biaya lebih karena mereka mengurus SIM melalui jalur tidak resmi. Kondisi ini terjadi karena

---

<sup>10</sup> Dora, Mike Destri. 2012. “Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi Keliling Pada Polresta Padang”. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Padang

adanya oknum aparat yang membuka ruang untuk terjadinya pengurusan SIM melalui jalur tidak resmi.<sup>11</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, meskipun sama-sama mengangkat tema SIM, tetapi pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada perilaku masyarakat dalam proses mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Perilaku masyarakat menentukan pilihannya dalam memperoleh sesuatu, karena masyarakat memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik, karena perilaku masyarakat dalam mencapai tujuannya berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh dorongan dari diri individu maupun dorongan dari lingkungan sosial masyarakat, serta keterbukaan dalam proses pelayan penerbitan SIM.

Perbedaan perilaku tersebut terlihat dari cara atau proses yang ditempuh masyarakat dalam proses mendapatkan SIM yaitu, perilaku konformitas dan perilaku non-konformitas dalam mendapatkan SIM. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Perilaku Masyarakat dalam Proses Mendapatkan SIM di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada perilaku masyarakat dalam proses mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah yang tertera pada UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas

---

<sup>11</sup> Purbadi, Rahmat. 2013. *Pelayanan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Kota Pontianak*. Tersedia dalam: <<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>> . [diakses 22 November 2013].

dan Angkutan Jalan, maka telah diwajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Adanya kebijakan di atas, maka Polri selaku lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIM harus menyediakan sebuah mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme pelayanan tersebut diawali dengan adanya penetapan syarat-syarat dan tahapan ujian sebagai tahapan prosedural dalam penerbitan SIM. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam proses penerbitan SIM. Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan masyarakat tidak selalu mengikuti prosedur tersebut. Selain itu berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Rahmat Purbadi di Resort Kota Pontianak, terdapat perbedaan pelayanan yang diberikan pihak Kepolisian yang didasarkan besar kecilnya imbalan yang diberikan masyarakat. Adanya permasalahan ini, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sebagian masyarakat dalam proses mendapatkan SIM.

Dari batasan dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah *bagaimanakah perilaku masyarakat dalam proses mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Polres Bukittinggi?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menjelaskan perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman peneliti untuk berfikir kritis dan sistematis serta mengaplikasikan ilmu yang peneliti peroleh.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Melihat perilaku masyarakat dalam pembuatan SIM terkait adanya kebijakan dan pelayanan pembuatan SIM.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan lalu-lintas, khususnya dalam pembuatan SIM yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori yang dipakai dalam mengkaji perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi yaitu teori pilihan rasional oleh James. S. Coleman. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa

yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Meski pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini memperlihatkan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Aktor mempunyai sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumber daya sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau mustahil sama sekali.

Inti dari penjelasan teori pilihan rasional adalah bahwa pilihan, keyakinan, sumber daya dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan rasional apabila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan keyakinan dan sumber daya yaitu dalam artian bahwa tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan keyakinan yang ia miliki dan dibuktikan secara *ex ante* dan bukan secara *ex post* (karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna, sehingga orang rasional tetap bisa melakukan kesalahan selain *ex post* (yaitu ketika dibandingkan dengan hasil nyatanya) biarpun secara *ex ante*, yaitu sebelum dampaknya diketahui,

keputusannya sudah rasional). Keyakinan akan dikatakan bila sesuai dengan bukti-bukti yang ada<sup>12</sup>.

Pengemudi atau pengendara bermotor merupakan aktor dalam pembuatan Surat Izin Mengendarai. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya pengendara mempunyai tujuan, dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Pengendara dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan) yaitu untuk memperoleh Surat Izin Mengendarai. Situasi dan kondisi dalam proses pembuatan Surat Izin Mengendarai sangat berbeda di lapangan, situasi dan kondisi seperti ini mendorong pengendara bermotor untuk melakukan tindakan lain untuk memperoleh tujuannya yaitu memperoleh Surat Izin Mengendarai sesuai dengan pilihan pengendara bermotor itu sendiri. Pengemudi kendaraan bermotor memiliki pilihan keyakinan dan sumberdaya dalam artian, bahwa tindakan yang ia lakukan dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan dalam memperoleh Surat Izin mengendarai.

Pilihan pengendara sesuai dengan keyakinan yang ia miliki dan dibuktikan secara *ex tence* dan bukan secara *ex post* (karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna, sehingga orang rasional tetap bisa melakukan kesalahan selain *ex post* (yaitu ketika dibandingkan dengan hasilnya) biarpun secara *ex tence*, dampaknya dari perilakunya dalam

---

<sup>12</sup>George Ritzer & Douglas J Goodman. 2011. *Teori Sosiologi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

mendapatkan SIM belum diketahui keputusan sudah rasional). Keyakinan dari pengendara bermotor dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi timbul berdasarkan kenyataan yang berbeda di lapangan dan bukti-bukti yang ada.

## **F. Penjelasan Konsep**

### **1. Perilaku Masyarakat**

Secara umum perilaku merupakan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perilaku, Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Menurut Robert Y. Kwick menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Sedangkan menurut Talcot Parsons menyatakan bahwa perilaku merupakan reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yaitu tindakan atau perbuatan masyarakat yang dapat diamati bahkan dipelajari, atau respon atau reaksi masyarakat terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara terpola dan dilakukan secara berulang-ulang.

Perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia dan dorongan itu merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dorongan

tersebut, menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindakan atau perilaku khusus yang mengarah pada tujuan. Sementara itu, para sosiolog melihatnya bahwa perilaku masyarakat tidak bisa dipisahkan dari konteks atau *setting* sosialnya. Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis “di luar sana” yang selalu mempengaruhi dan membentuk dirinya, namun pada hakekatnya merupakan sebuah proses interaksi.<sup>13</sup>

## 2. Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dalam mendapatkan SIM diperlukan usaha-usaha dari pemohon sebagai upaya mendapatkan SIM. Proses untuk mendapatkan SIM dimulai dengan memenuhi prasyarat pemohon SIM dan dilanjutkan dengan ujian teori dan praktik. Ujian praktik terbagi lagi menjadi dua yaitu ujian keterampilan mengemudi melalui simulator dan ujian praktik di lapangan. Proses penerbitan SIM tersebut merupakan wujud mekanisme pelayanan Polri selaku lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIM.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi yang berpusat di Jalan Sudirman. Luas wilayah

---

<sup>13</sup> Kustyana, Reni. Perilaku Masyarakat dalam Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan”. *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya*.

hukum Polres Bukittinggi 816.334 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 2 wilayah yaitu Kota Bukittinggi (25.239 Km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Agam (Agam Timur 74.195 Km<sup>2</sup>)<sup>14</sup>. Alasan yang peneliti anggap menarik untuk meneliti di daerah kota Bukittinggi karena dalam peraturan penerbitan SIM di Polres Bukittinggi pemohon SIM harus memiliki sertifikat mengemudi sebagai syarat dalam proses penerbitan SIM. Selain itu angka penerbitan SIM di Polres Bukittinggi pada tahun 2014 tercatat sebanyak 23.000 pemohon sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan Polresta Padang hanya 20.150 pemohon pada tahun 2015.

Alasan lainnya karena kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Barat yang dikenal sebagai kota wisata, kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan peristirahatan. Sehingga banyak kegiatan ataupun aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Kota Bukittinggi juga terletak pada posisi sentral terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru sehingga banyak kendaraan yang melintas di Kota Bukittinggi.

## 2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang berusaha

---

<sup>14</sup> Resor Kota Bukittinggi. 2009. *Rencana Kontijensi Menghadapi Terorisme Polresta Bukittinggi Tahun 2009*. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Bukittinggi.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi berupa ungkapan dan penuturan langsung dari informan tentang bagaimana perilaku masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi dalam proses mendapatkan SIM. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu agar penelitian ini dapat menggali secara mendalam tentang perilaku masyarakat SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian di kasus intrinsik yaitu studi kasus yang dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih di arahkan pada upaya menelaah masalah atau fenomena kontemporer yang bersifat kekinian.<sup>16</sup> Alasan pemilihan atau kasus tersebut bukan karena mewakili kasus lain melainkan dengan kekhususannya sehingga kasus itu memang menarik. Dalam penelitian ini peneliti tidak membandingkan dengan kasus lain melainkan melakukan studi pada sebuah kasus yaitu mengenai perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM. Studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Moleong, J. Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hlm 4.

<sup>16</sup> Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada., hlm 20.

### 3. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu *purposive sampling* (sampel bertujuan) dimana sampel ditetapkan sengaja oleh peneliti. *Purposive sampling* merupakan teknik dalam *non-probability sampling* yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup> Alasan peneliti memilih teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan karena peneliti melihat permasalahan penelitian sudah jelas informan yang peneliti libatkan, sehingga peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu sebagai informan. Adapun yang menjadi kriteria penelitian dalam menetapkan informan penelitian diantaranya informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan penulis bahwa informan yang dipilih memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kriteria informan dalam penelitian ini yaitu : (1) Orang yang sedang membuat SIM. (2) Orang yang telah pernah membuat SIM (3) Petugas yang berperan dalam pembuatan SIM, serta orang-orang yang bisa menunjang informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penulisan ini.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 41 orang, terdiri dari 3 orang yang sedang membuat SIM, 33 orang telah membuat SIM, dan 5 orang petugas polisi satuan lalu lintas. Alasan peneliti mencukupkan

---

<sup>17</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika., hlm 106.

informan sebanyak 41 orang karena jumlah informan yang tertera di atas sudah menjawab tujuan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mulai dilakukan sebelum dan setelah seminar proposal hingga keluarnya surat izin penelitian dari fakultas. Selanjutnya peneliti meminta izin ke kantor kesatuan bangsa dan politik pemerintah kota Bukittinggi terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan penelitian lebih kurang tiga bulan dimulai dari bulan 14 Juli hingga 30 September 2015. Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara langsung dengan informan di lapangan. Sementara untuk data sekunder peneliti dapatkan peroleh berupa “Data laporan penerbitan SIM tahun 2012 sampai 2014” dan data lainnya berkaitan dengan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bukittinggi tahun 2012 sampai 2014.

Proses pengambilan data pada satuan lalu lintas Polres Bukittinggi tidak begitu sulit karena peneliti sudah kenal dengan beberapa petugas satuan lalu lintas Polres Bukittinggi, dan kerabat peneliti juga merupakan petugas kepolisian sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berikut pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian:

a. Observasi

Observasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak<sup>18</sup>. Tujuannya adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang (aktor) yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan dan panduan pengamatan.

Pengamatan dilakukan dengan cara metode observasi partisipasi pasif atau *passive participation*. Dalam hal ini peneliti datang ke tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi sering dilakukan pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Faktor cuaca dan keuangan menjadi kendala ketika peneliti melakukan penelitian ke tempat informan yang pernah membuat SIM. Selain itu dokumentasi dalam proses penerbitan SIM sulit peneliti lakukan karena dianggap sebagai wartawan pada saat berada di lingkungan Polres Bukittinggi. Namun peneliti tetap berupaya mendapatkan beberapa dokumentasi tanpa sepengetahuan petugas, sehingga penelitian yang peneliti lakukan dalam jangka kurang lebih tiga bulan tidak maksimal terlaksana.

---

<sup>18</sup> Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta., hlm 99.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) yang mampu memberikan semua informasi dari semua pihak atau informan yang terlibat. Pelaksanaan wawancara dilakukan berulang-ulang guna mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana perilaku masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi dalam proses mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dari 41 informan yang peneliti wawancarai, ada 20 orang yang diwawancarai secara mendalam.

Tipe wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur atau *structured interview* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah berisikan pertanyaan pokok yang kemudian dikembangkan ketika wawancara langsung. Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah masyarakat yang sedang dan yang telah pernah membuat SIM di Polres Bukittinggi. Peneliti juga mewawancarai beberapa petugas yang peneliti kenal terkait perilaku-perilaku masyarakat yang tampak untuk memperkuat data.

Wawancara yang dilakukan tidak selalu berjalan lancar, kadangkala peneliti mendapatkan kesulitan bertanya kepada informan yang tidak paham dengan pertanyaan yang peneliti sampaikan, sehingga butuh beberapa penjelasan khususnya mengenai jalur resmi penerbitan SIM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas yang juga menjadi informan juga tidak mudah untuk diwawancarai yang terlihat dari sikap

petugas yang sedikit tertutup memberikan informasi. Namun peneliti berusaha mencari informasi dari informan dan beberapa petugas lainnya yang peneliti kenal.

Hasil wawancara selalu peneliti buat catatannya. Catatan tersebut berisi poin-poin penting yang peneliti butuhkan dalam penulisan skripsi, peneliti juga menggunakan alat perekam dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan perilaku-perilaku masyarakat dalam proses mendapat SIM.

c. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh informan. Angket dalam penelitian ini disebar ke 150 informan untuk mendapatkan data awal terkait perilaku atau jalur yang pernah ditempuh masyarakat yang berada pada wilayah hukum Polres Bukittinggi terkait penerbitan SIM yang ditempuh informan.

d. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>19</sup> Teknik ini adalah penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, serta rekaman.

---

<sup>19</sup> Basrowi dan Suwandi. *Op.cit.*, hlm 158.

Data ini dapat bermamfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

Pada penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan berasal dari petugas satuan lalu lintas Polres Bukittinggi. Peneliti mendapatkan data permohonan penerbitan SIM tahun 2012 sampai 2014 serta data kecelakaan lalu lintas tahun 2012 sampai 2014. Selain itu peneliti mendapatkan beberapa foto pemohon SIM pada saat pengurusan SIM dan beberapa rekaman pembicaraan peneliti dengan beberapa informan yang telah pernah membuat SIM di Polres Bukittinggi. Dokumentasi ini bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian.

#### 5. Triangulasi Data

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji kebenarannya dan terpercayanya suatu data yang diperoleh dalam penelitian, maka dilakukanlah triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang sama yang dikembangkan dari pedoman wawancara terhadap beberapa informan berbeda kemudian dilakukan pengecekan ulang. Data dianggap valid apabila diperoleh data jawaban yang relatif sama dari para informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah peneliti tetapkan dengan pertanyaan yang pada intinya adalah relatif sama untuk pengecekan kebenaran data.

Data dianggap benar apabila dari pertanyaan yang diajukan sudah terdapat jawaban yang relatif sama dari informan yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk mengecek data dari sumber atau informan yang berbeda tersebut, sehingga diperoleh keabsahan data. Apabila dengan teknik pengumpulan data tersebut berbeda-beda, maka peneliti menggali informasi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang benar

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh yaitu mencakup, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, pemberian kode dan mengkategorikan sehingga dapat dicari pola hubungan antara data tersebut. Analisis data dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisa jawaban dari jawaban-jawaban yang diberikan informan. Apabila jawaban atau informasi dari informan belum memuaskan, maka peneliti bertanya lagi sampai jawaban yang diperoleh mengalami kejenuhan dan data sudah dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh”.<sup>20</sup> Untuk menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan model analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu model analisis interaktif (*Interaktif Model of Analisis*), yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>21</sup> Peneliti mengumpulkan seluruh data terkait. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan di lapangan disederhanakan, disortir, dipilih hal-hal pokok kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari polanya dan juga ditransformasikan dari data mentah tersebut menjadi data jadi. Abstraksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membuat rangkuman teks naratif mengenai hasil wawancara dengan informan tentang perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di Polres Bukittinggi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan melakukan pengelompokan data dan menjelaskan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk melihat gambaran keseluruhan maka data tentang perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di

---

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta., hlm 246.

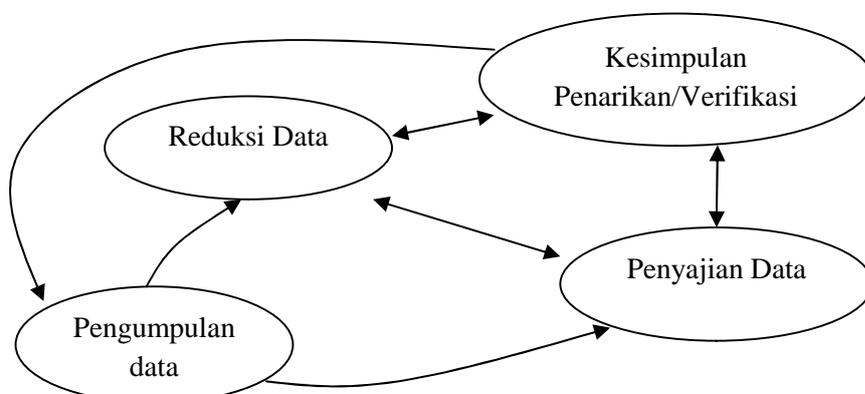
<sup>21</sup> Mathew, Milles dan Michael A Huberman. 2009 . *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press., hlm 16.

Polres Bukittinggi disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data yang lebih utuh.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data, sehingga akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal serta didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dari berbagai informan yang peneliti wawancarai untuk analisa data sampai penarikan kesimpulan, peneliti tidak merasa sulit untuk menarik kesimpulan. Hal ini disebabkan dominan dari hasil wawancara jawaban relatif sama. Sehingga lebih memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan.



Gambar 1. Model analisis interaktif (*Interactive Model Analysis*)<sup>22</sup>

Bagan di atas menunjukkan bahwa adanya suatu proses siklus interaktif, dimulai dari pengolahan data, pengorganisasian data hingga menyimpulkan data yang telah dianalisis secara bertahap. Hal ini menggambarkan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang dan terjadi secara terus menerus. Setiap tahapan dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan saling berhubungan satu sama lain.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 20.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM POLRES BUKITTINGGI**

#### **A. Kota Bukittinggi**

##### **1. Keadaan Geografis**

Posisi Kota Bukittinggi terletak antara 100<sup>o</sup>20'-100<sup>o</sup>25' BT dan 00<sup>o</sup>16'-00<sup>o</sup>20'LS dengan ketinggian sekitar 780 - 950 meter dari permukaan laut.<sup>23</sup> Posisi ini menjadikan iklim di Kota Bukittinggi masuk ke dalam iklim tropis. Udaranya relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Kota Bukittinggi terhadap lintasan regional antara ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan Padang ke Pekanbaru.<sup>24</sup>

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *tuff* dari lereng Gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.<sup>25</sup>

Kondisi topografi Kota Bukittinggi beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit, berlembah dan dibeberapa kawasan memiliki keterjalan

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. (*Bukittinggi dalam Angka 2014*).

<sup>24</sup> Pokja Sanitasi Kota Bukittinggi., hlm 1.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi (*Bukittinggi dalam Angka 2014*). *Op.cit.*, hlm 3.

hampir vertikal. Ada 27 bukit yang tersebar di Kota Bukittinggi, yaitu<sup>26</sup>: Bukit Mandiangin, Bukit Ambacang, Bukit Upang-Upang, Bukit Pauah, Bukit Lacia, Bukit Jalan Aua Lam Pasa, Bukit Cindai, Bukit Campago, Bukit Gumasik, Bukit Gamuak, Bukit Guguk Bulek, Bukit Sangkuik, Bukit Apit, Bukit Pinang Sabatang, Bukit Jirek, Bukit Malambuung, Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Sarang Gagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cangang, Bukit Parit Natuang, Bukit Paninjauan, Bukit Sawah Laweh, Bukit Batarah, Bukit Panganak, Bukit Kandang Kabau dan Bukit Gulimeh.

Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulai Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi. Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2: Keadaan Geografis, Iklim dan Topografi Kota Bukittinggi**

No.	Letak Geografis, Iklim dan Topografi		Keterangan
1.	Letak Geografis		Bukittinggi terletak antara 100 <sup>0</sup> 20-100 <sup>0</sup> 25 BT dan 00 <sup>0</sup> 16-00 <sup>0</sup> 20LS
2.	Ketinggian dari Permukaan Laut		Sekitar 780 - 950 Meter
3	Batas Daerah	Utara	Dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
		Selatan	Dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 1-2.

		Barat	Dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
		Timur	Dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam
4.	Iklim	Temperatur udara	Berkisar Max. 24,9 <sup>0</sup> C Min 16,1 <sup>0</sup> C
		Kelembaban udara	Berkisar Max. 90,8% Min 82,0%
		Tekanan udara	Berkisar 22,C-25.C
5.	Topografi	Permukaan Bumi tidak rata, bergelombang dan berbukit. Di kota Bukittinggi terdapat sungai kecil, yaitu : Batang Tambuo di sebelah timur, Batang Sianok mengalir di sebelah barat. Tanah merupakan lapisan <i>tuff</i> dari lereng Gunung Merapi, karena itu tanahnya subur.	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi (Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2014)

Luas daerah Kota Bukittinggi lebih kurang 25,239 km<sup>2</sup>, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan, dengan Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 12,156 km<sup>2</sup>. Wilayah yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya berada dibawah pemerintahan Kabupaten Agam. Jarak Kota Bukittinggi dari ibu kota Propinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km<sup>2</sup>, dengan melalui jalan yang menanjak dan berliku, terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

## 2. Keadaan Demografis

### a. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2013 adalah 118.260 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar adalah 1,88 persen pertahun. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 40,98 persen. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan

banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.<sup>27</sup>

Namun demikian Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 6.264 jiwa per km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.139 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan komposisi penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 3: Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin tahun 2013**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Guguk Panjang	21068.00	22389.00
Mandiangin Koto	23784.00	24677.00
Aur Birugo Tigo Baleh	12409.00	13933.00

Sumber: Statistik Kota Bukittinggi tahun 2013

#### **b. Pendidikan**

Pada tahun 2013 jumlah SD Negeri sebanyak 45 unit dan SD Swasta 11 unit, terjadi perubahan jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya karena ada penggabungan SD. Pada SLTP negeri tidak terjadi perubahan yaitu berjumlah 8 unit. Begitu juga dengan jumlah SLTA negeri juga tidak mengalami perubahan tetap berjumlah 5 unit. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi atau akademi negeri ataupun

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 35.

swasta pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 9.550 orang dari 14.271 orang tahun 2012.<sup>28</sup>

### c. Pekerjaan

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja dibagi menjadi 5 kelompok sektor. Penduduk Bukittinggi banyak bekerja di sektor 3 (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel) 43,94 persen. Kemudian diikuti sektor 4 (jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan) 23,42 persen, kelompok sektor 2 (industri pengolahan) 17,64 persen, kelompok sektor 5 (lainnya) 13,61 persen, dan sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) 1,37 persen.<sup>29</sup>

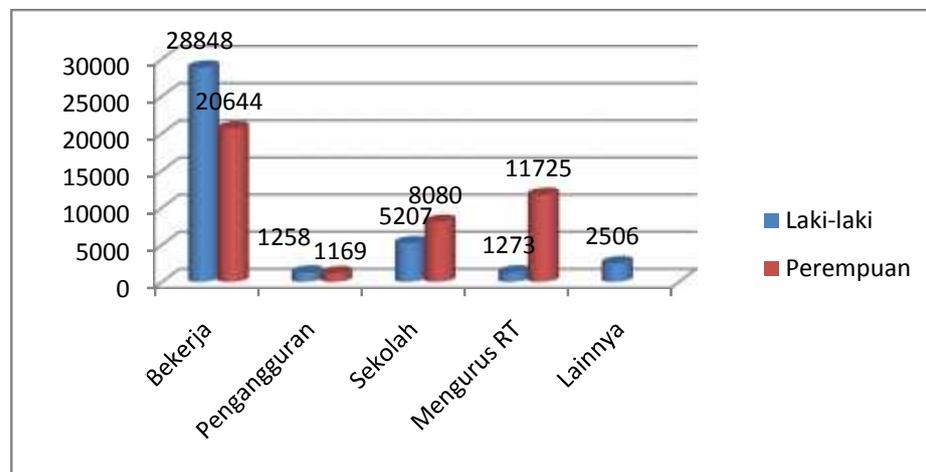
Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, disisi lain juga karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan. Kesiapan perempuan memasuki pasar atau dunia kerja ini ditunjukkan melalui persentase perempuan yang bekerja yaitu sebesar 41,71 persen dari penduduk yang bekerja. Berikut akan disajikan diagram usia angkatan kerja menurut kegiatan utama dan jenis kelamin Kota Bukittinggi:

---

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. *Statistik Daerah Kota Bukittinggi 2014. Op.Cit.*, hlm10

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 9.

**Digram 1: Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2013**



Sumber: Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2014

#### d. Kondisi Sosial Masyarakat

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakatnya terkenal dengan tata kehidupan yang menggunakan sistem *matrilineal* dengan adat istiadatnya yang unik. Dalam sistem ini harta pusaka, gelar dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu.

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan.

Walaupun sampai saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang

teguh adat-istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan “*Syarak Mangato Adaik Mamakai*”.

Hal tersebut terlihat dari banyak dan semaraknya kegiatan yang berbau keagamaan dan sudah mengental dalam bentuk kegiatan budaya seperti khatam Qur’an dan perayaan hari besar Islam. Saat ini dengan adanya gerakan kembali kenagari maka kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat.<sup>30</sup>

## **B. Wilayah Hukum Polres Bukittinggi**

Polres Bukittinggi terletak di Pusat Kota Bukittinggi di Jalan Sudirman No 23. Posisi geografi wilayah hukum Polresta Bukittinggi terletak antara 00 19 LU dan 100 21 BT.<sup>31</sup> Luas wilayah hukum Polresta Bukittinggi 816.334 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 2 wilayah yaitu :

### **a. Kota Bukittinggi**

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Sementara itu, dari total luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini (25,24 km<sup>2</sup>), 82,8%

<sup>30</sup> Pokja Sanitasi Kota Bukittinggi. *Op.cit.*, hlm 4-5.

<sup>31</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Bukittinggi. *Rencana Kontijensi Menghadapi Terorisme Polres Bukittinggi Tahun 2009*. Bag Ops Polresta Bukittinggi

telah diperuntukkan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 kelurahan dan 1 Polsekta.<sup>32</sup>

#### **b. Kabupaten Agam (Agam Timur) 74.195 KM<sup>2</sup>**

Kabupaten Agam (Agam Timur) terdiri dari 9 Kecamatan dan 6 Polsek.<sup>33</sup> Batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Pasaman, sebelah Selatan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Timur dengan Kabupaten 50 Kota, Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam. Kondisi wilayah terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan bukit barisan (Gunung Merapi dan Gunung Singgalang), Medannya berbukit-bukit atau gunung dan bergelombang, hutan dan belukar.

Terdapat tujuh Polsek standar yang berada di wilayah hukum Polres Bukittinggi.<sup>34</sup> Adapun kepolisian sektor yang ada di wilayah hukum Polres Bukittinggi sebagai berikut :

##### **a. Polsek Bukittinggi**

Polsek Bukittinggi adalah satu satunya Polsek di Kota Bukittinggi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam bagian Timur yang juga merupakan wilayah hukum Polres Bukittinggi. Polsek Kota Bukittinggi terletak di Jalan Soekarno-Hatta Bukittinggi yang berdekatan dengan Simpang Lambau Bukittinggi. Polsek Kota

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>34</sup> Tribata News Polres Bukittinggi. [Internet]. Tersedia dalam: <https://restabukit.wordpress.com/>. [diakses 10 Juli 2015]

Bukittinggi berada di Kota Bukittinggi. Wilayah hukum Polsek Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

**b. Polsek Banuhampu Sungai Puar**

Polsek Banuhampu Sungai Puar terletak di Jalan Banuhampu. Polsek Banuhampu Sungai Puar merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi, yang mana Polsek tersebut berbatasan langsung dengan Polsek X Koto wilayah Hukum Polres Padang Panjang. Polsek Banuhampu Sungai Puar membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Puar. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Banuhampu Sungai Puar sebanyak 55.997 orang yang terdiri dari Kecamatan Banuhampu 32.947 orang dan kecamatan Sungai Puar 23.050 orang.

**c. Polsek IV Koto**

Polsek IV Koto terletak di Koto Tuo Jalan Raya Bukittinggi-Maninjau. Polsek IV Koto merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi, yang mana polsek tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Hukum Polres Padang Pariaman dan wilayah hukum Polres Agam. Polsek IV Koto membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek IV Koto sebanyak 33.072 orang.

**d. Polsek Tilatang Kamang**

Polsek Tilatang Kamang terletak di Pakan Kamis Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Polsek Tilatang Kamang merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi, yang mana Polsek tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Hukum Polres 50 Kota. Polsek Tilatang Kamang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Kamang Magek. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Tilatang Kamang sebanyak 52.760 orang yang terdiri dari kecamatan Tilatang Kamang 32.355 orang dan Kecamatan Kamang Magek 20.405 orang.

**c. Polsek IV Angkat Canduang**

Polsek IV Angkat Canduang terletak di Simpang Biaro Kecamatan IV Angkat Canduang. Polsek IV Angkat Canduang merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi, yang mana Polsek tersebut berbatasan langsung dengan wilayah hukum Polres Tanah Datar. Polsek IV Angkat Canduang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu, Kecamatan IV Angkat dan Kecamatan Canduang. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek IV Angkat Canduang sebanyak 57.523 orang yang terdiri dari Kecamatan IV Angkat 34.429 orang dan Kecamatan Canduang 23.094 orang.

**d. Polsek Baso**

Polsek Baso terletak di Jalan Baso-Payakumbuh. Polsek Baso merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi,

yang mana Polsek tersebut berbatasan langsung dengan wilayah hukum Polres 50 Kota dan Polres Tanah Datar. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Baso sebanyak 52.760 orang.

**e. Polsek Palupuh**

Polsek Palupuh terletak di Jalan Raya Palupuh-Pasaman. Polsek Palupuh merupakan Polsek perbatasan pada wilayah hukum Polres Bukittinggi. Polsek Palupuh berbatasan langsung dengan wilayah hukum Polres 50 Kota, wilayah hukum Polres Pasaman dan wilayah hukum Polres Agam. Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Palupuh sebanyak 13.814 orang. Mata pencaharian masyarakat Palupuh pada umumnya bertani, dan sebagian kecil sebagai pedagang dan pegawai negeri.

**C. Prosedur Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Bukittinggi**

Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan ini untuk mengatasi permasalahan dinamika kehidupan berlalu lintas. Kebijakan itu tertera pada UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Tujuan umum kebijakan ini adalah untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Adanya kebijakan ini sehingga Polri selaku lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIM harus menyediakan sebuah mekanisme pelayanan

penerbitan SIM. Kewenangan Polri tersebut tertera pada undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 15 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: (2b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan (2c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.<sup>35</sup> Maka dari itu satuan lalu lintas Polres Bukittinggi berupaya memberikan pelayanan ataupun menyediakan mekanisme penerbitan SIM. Adapun visi dan misi pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) satuan lalu lintas Polres Bukittinggi sebagai berikut:

### **1. Visi**

Terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

### **2. Misi**

- a) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)
- b) Menyelenggarakan tata tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM)
- c) Menyajikan data sebagai bahan reformasi tentang identitas yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
- d) Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)

---

<sup>35</sup> Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika., hlm 13.

Sedangkan mekanisme pelayanan penerbitan SIM di Polres Bukittinggi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Persyaratan

Permohonan SIM perseorangan merujuk pada Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu:

a. Usia

- 1) 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
- 2) 20 tahun untuk SIM B1
- 3) 21 tahun untuk SIM B2

b. Administratif

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Memiliki sertifikat mengemudi

Pemohon SIM golongan umum harus melampirkan sertifikat lulus mengemudi ketika melengkapi persyaratan penerbitan SIM. Hal ini dilakukan Polres Bukittinggi sebagai bentuk upaya untuk meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Mengisi formulir permohonan, untuk mendapatkan sertifikat lulus mengemudi pemohon SIM harus mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berlokasi di Aur Atas.

- 3) Rumusan sidik jari

c. Kesehatan

- 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
- 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

d. Lulus ujian

- 1) Ujian teori
- 2) Ujian praktek dan/atau
- 3) Ujian keterampilan melalui simulator

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:

- a. Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan
- b. Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009:

- a. Persyaratan Usia
  - 1) SIM A Umum 20 tahun
  - 2) SIM B1 Umum 22 tahun
  - 3) SIM B2 Umum 23 tahun
- b. Persyaratan Khusus
  - 1) Lulus Ujian Teori
  - 2) Lulus Ujian Praktik

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009:

- a. Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
- b. Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan
- c. Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan
- d. KTP atau jati diri
- e. Lulus ujian teori dan Praktek I dan Praktek II
- f. Diwajibkan mengikuti klinik mengemudi

## 2. Tata Cara

- a. Mengisi formulir permohonan disertai foto copy KTP dan pas photo
- b. Mengikuti ujian Teori
- c. Bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki
- d. Bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk pembuatan SIM

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah telah mewajibkan para pengendara bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kebijakan itu tertera pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya kebijakan tersebut membuat Polri selaku lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIM menyediakan mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan tersebut diawali dengan adanya penetapan persyaratan dan tahapan ujian sebagai tahapan prosedural dalam penerbitan SIM. Namun, kenyataan di lapangan masyarakat tidak selalu mengikuti prosedur yang ada. Sebagian masyarakat menganggap bahwa prosedur tersebut mempersulit mereka karena memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pelayanan yang diberikan terkesan berbelit-belit, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku masyarakat dalam mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa perilaku masyarakat dalam proses mendapatkan SIM di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Pertama, perilaku konformitas yang terdiri dari perilaku mau mengantri dan perilaku patuh dan taat pada peraturan pembuatan SIM. Kedua, perilaku non-konformitas terdiri dari perilaku tidak mau mengantri, perilaku mengikuti jalur pintas penerbitan SIM, perilaku yang memanfaatkan pihak ketiga yang terdiri

atas perilaku yang memanfaatkan jasa calo dan memanfaatkan anggota keluarga atau kerabat dan teman, dan perilaku ikut-ikutan.

Perbedaan perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki masyarakat, pengetahuan peraturan yang ada, nilai dan norma yang telah didapatkan dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, organisasi kerja, masyarakat umum, serta adanya rangsangan ataupun tekanan pada situasi tertentu, seperti adanya proses layanan yang kurang memuaskan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Bukiitinggi, peneliti memberikan saran:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait, hendaknya memberikan sosialisasi yang lebih gencar mengenai pentingnya SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat meningkat. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan penerbitan SIM sehingga tidak ada lagi kekecewaan masyarakat dalam upaya mendapatkan SIM. Meminimalisir tindakan penerbitan SIM yang tidak sesuai prosedural dan peraturan yang berlaku.
2. Masyarakat hendaknya mengikuti prosedural yang telah ditetapkan pemerintah, karena tujuan penerbitan SIM sendiri untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Masyarakat atau pengendara bermotor hendaknya lebih percaya

diri atas kemampuannya dan tidak menggunakan jasa calo atau pihak ketiga lainnya sebagai perantara.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil temuan penelitian ini bisa dijadikan studi relevan dan data awal penelitian lanjutan. Bagi yang ingin meneliti tentang SIM barangkali masih banyak yang bisa diteliti atau melakukan penelitian yang sama, misalnya tentang “*SIM Tembak Sebagai Pilihan Pengendara Bermotor*” atau “*Hubungan Jalur Penerbitan SIM Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor*”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Ajar Sekolah Ahli Golongan (SAG) Pendidikan Perwira Polri. 2011. *Fungsi Teknis dan Manajemen Operasional Lalu Lintas*. Lembaga Pendidikan Polri.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2003. *Metode Triangulasi di dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: PT Grafindo Persada).
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dora, Mike Destri. 2012. "Optimalisasi Pelayanan Surat Izin Mengemudi Keliling Pada Polresta Padang". *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Junaidi. 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Padang: Hayfa Press
- Kustyana, Reni. Perilaku Masyarakat dalam Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan". *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Moleong, J. Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mathew, Milles dan Michael A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Resor Kota Bukittinggi. 2009. *Rencana Kontinjensi Menghadapi Terorisme Polresta Bukittinggi*. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Bukittinggi.
- Setiadi, Elly.M. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Siahaan, Romeyan Ricardo. 2008. Persepsi Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan SIM C (Studi Pada Kantor Sat Lantas Polresta Tebing Tinggi). *Skripsi*. Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: C.V Rajawali.

Soekanto, Soerjono..1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. C.V Andi Offset : Yogyakarta

### **Internet**

Anjaningtyas, Nurul Eka. 2014. Pengertian Prilaku Manusia. Tersedia dalam: <<http://dianhusadanuruleka.blogspot.com>> [diakses 22 November 2014].

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 2013. Tersedia dalam: <http://www.bantuanhukum.or.id>. [diakses 25 Mei 2014].

Katon. 2014. Cara Mengurus SIM (Membuat dan Memperpanjang SIM). Tersedia dalam: <<https://katonsasongko.wordpress.com/>>. [diakses 22 November 2014].

Purbadi, Rahmat. 2013. *Pelayanan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Kota Pontianak* [Internet]. Tersedia dalam: <<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>>. [diakses 22 November 2013].

### **Perundang –Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Grafika.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan